

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, jakarta, 2010.
- Iman Jalaludin Rifa'I et al., *metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Banten:PT Sada Kurnia Persada,2023).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditima, 2015.
- Moenir, *Manajemen pelayanan umum di indonesia*, jakarta Bumi Aksara, 2001.
- N.M. Spelt dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Gruoup, 2016)
- Siti kotijah, *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV MEA, Jakarta, 2020.

B. JURNAL

- Endang Putri Ayu, Arrie Budhiartie and Ivan Fauzani Raharja, "Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative law* 3, no. 3 (Oktober 6, 2022): hal. 158.
- Novia Ayu Tantri and Arrie Budhiartie, "Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 2 (June 11, 2021): hal.77, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11422>.

Restu Dedis Ahdhan, “Impelemntasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser” 2 (2009).

Sukur Suleman and Rahmat Abd Fatah, “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate” 7 (2021): hal 69-70.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Udang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan

Surat edaran No. Hk 02.01/Menkes/6/2024 tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undand-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 900/MENKES/SK/VII/II/2002 mengenai registrasi serta praktik bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan praktik bidan

Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Gubernur Jambi No 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan Non perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan walikota Jambi No 78 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dari WaliKota Kepada DPMPSTP

Peraturan walikota Jambi No 49 Tahun 2016 jo Peraturan walikota Jambi No 55 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada DPMPTSP Kota Jambi

TULISAN ILMIAH YANG DI PUBLIKASIKAN

Dewita Falya Anestama, “Pengaturan Izin Praktik Mandiri Perawat Di Kota Jambi,” Skripsi (2021).

Rudy Sukarno, “Pemberian Izin Praktik Bidan Di kota Magelang,” Skripsi (2021).

D. BADAN LAINNYA DARI INTERNET

[https://dpmptsp.bandung.go.id/profil#:~:text=Dinas%20Penanaman%20Modal%20dan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu%20\(DPMPTSP\)%20merupakan,transparan%20kepada%20masyarakat%20Kota%20Bandung](https://dpmptsp.bandung.go.id/profil#:~:text=Dinas%20Penanaman%20Modal%20dan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu%20(DPMPTSP)%20merupakan,transparan%20kepada%20masyarakat%20Kota%20Bandung). Di akses 11 november 2023 jam 20:07 wib